

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus dalam segala aspek baik itu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukumnya.

¹ Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm.11.

Menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam situasi darurat, pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: "pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Dari beberapa situasi darurat yang disebutkan diatas, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah

kejahatan. Dalam undang undang tersebut juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba telah mengancam masa depan anak.² Selain itu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam penjelasan umum disebutkan bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang mendapatkan atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang dari orang tua, wali, atau saudara, akan mudah terpengaruh dan terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan

² Galih Pakuan, *Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja*, <http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=39>Penyebaran, diakses tanggal 28 Oktober 2019

lingkungan yang bebas dan memicu melakukan tindak pidana yang akan merugikan perkembangan pribadinya.³

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Upaya pembinaan dan perlindungan anak salah satunya dengan memberikan pendidikan tentang bahaya penggunaan narkoba, dan adanya sanksi pidana apabila menyalahgunakan narkoba tersebut.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang membingungkan. Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak sangat terbatas. Sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Tetapi pada kenyataannya peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasil dari keputusan terhadap kasus tersebut seringkali tidak memuaskan dan mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, Malang 2009, hlm 9

Berbagai instrumen hukum, baik Nasional maupun Internasional juga mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya. Bahkan menurut *the united nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice* (Beijing rules), terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan.⁴

Melihat fakta di lapangan seringkali hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilanannya. Tentunya amanat Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan restoratif (*restoratif justice*), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan dari tindakan yang dilakukan pelaku. Artinya untuk

⁴ Muhammad Alfin Khoiru, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana oleh anak di bawah Umur di Kota Yogyakarta tahun 2014*, Jurnal Hukum, hlm 6

pemenuhan keadilan dan perlindungan dalam hak-hak anak tersebut. Kedudukan anak menurut Pasal 22 Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan untuk anak yang berusia 8-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Contoh kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 18.45 wib di Jl. Raya Sawojajar Gg. VII No. 28 Rt. 01/02 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, telah dilakukan penangkapan terhadap “Anak” yang sedang pesta narkoba jenis sabu sabu narkoba golongan I dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bersama dengan 3 (tiga) orang temannya. Sabu sabu itu didapat dengan cara membeli patungan seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), “Anak” sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Saksi 4 sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Saifudin sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa sabu sabu tersebut dan dalam pengusaan terdakwa untuk dimiliki lalu terdakwa bersama Saksi 3 (dalam penuntutan terpisah), Irawan Arif Wahyuda (dalam penuntutan terpisah), Saksi 5 (dalam penuntutan terpisah) memakai sabu sabu di rumah terdakwa dengan cara memakai alat bong yang terdiri dari sedotan air minum, tabung/botol bekas air mineral, serta kaca berbentuk seperti pipa kemudian sabu sabu dimasukkan dalam pipa kaca lalu dibakar dengan korek api kemudian asabnya dihisab

seperti menghisab rokok. Tindakan tersebut melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dalam masa persidangan, terdakwa “Anak” mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Berdasarkan hal tersebut, hakim berpendapat bahwa “Anak” mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dan mempertimbangkan bahwa anak tersebut akan dijatuhi pidana penjara karena belum ada alternatif lain untuk menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan fakta diatas, hakim mengadili terdakwa “Anak” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa sebenarnya dari kasus di atas terdakwa “Anak” lahir tanggal 10 Juni 2001 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini membuktikan bahwa seharusnya anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tidak dijatuhi hukuman pidana penjara agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat anak itu sendiri. Dapat diambil kesimpulan anak yang belum genap berumur 18 tahun merupakan anak dibawah umur. Berdasarkan latar belakang dan beberapa alasan tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul : **“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 10/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mlg ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada anak penyalahguna narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mlg ?
2. Apakah putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mlg telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat

- a. Penelitian Hukum Ini sebagai sayarat penulis memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk menindaklanjuti pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.

2. Kegunaan

Bagi Masyarakat diharapkan dapat dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pandangan secara subjektif terkait Penegakan hukum terhadap tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Malang.

Bagi Pemerintah dapat dijadikan salah satu bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia khususnya bagi para pengambil keputusan dan para pembuat kebijakan pada pemerintahan saat ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila memakai metodologi yang lengkap.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian⁵. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif . Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti⁶.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁷ Berdasarkan ruang lingkup dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil ialah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, secara oprasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁸

”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”. Bahan Hukum Primer yang digunakan peneliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam

mengungkap suatu kebenaran hukum.⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum tugas akhir ini adalah dilakukan melalui model studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Informasi tersebut didapat dari beberapa perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, dan *browsing* internet, dan *website*.

4. Analisa Bahan Hukum

Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan memulai analisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang tersusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah

⁹ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29

yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah pembuatan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik terkait Teori Negara Hukum, Teori HAM, dan Teori Demokrasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan sebagai obyek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Malang. diuraikan dengan sistematika penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis

terhadap permasalahan yang diangkat serta menjadi masukan yang bermanfaat terhadap pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

